



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : T.TEVIANA
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FE
3. NHK : 809470

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.826.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 384 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 172 m2/70 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 975.000.000
4. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 76.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 8 m2/14 m2 di KAB / KOTA ---, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **975.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. MOBIL, CHERY TIGGO 7 PRO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. MOBIL, WULLING AIR EV Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**

D. SURAT BERTAGIH **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **209.382.633**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 4.010.382.633

III. HUTANG

Rp. 256.174.146

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.754.208.487

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.